KEPEMIMPINAN BUPATI ABDUL HADI DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 1968-1979

Bhre Widyaloka Mertowijoyo, Mrr. Ratna Endang Widuatie, S.S., M.A.

E-mail: widyalokabhre1@gmail.com, ratnaendang.sastra@unej.ac.id

***Abstract** : This study discusses the leadership of Regent Abdul Hadi in Jember Regency in 1968-1979. With the aim of knowing how Abdul Hadi's leadership was for two periods. This writing uses psychology to help provide an overview of the influence of individuals on the form and course of leadership. Leadership theory is used to analyze Abdul Hadi's form of leadership. This study employed a historical method consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Before becoming regent, he had a military background that influenced his leadership path. Abdul Hadi was elected Regent of Jember Regency by acclamation in 1968 when he served as Dandim 0824 Jember. The results showed that Abdul Hadi's paternalistic leadership style was used for two periods in regional development, this style was fatherly who always guided his subordinates. A friendly attitude and good communication between leaders and the community encouraged the development programs to be easier to implement. For example, in the construction of the Jami' Al Baitul Amien Mosque in Jember, the plan to build this mosque came from Abdul Hadi's desire to have a mosque that could accommodate the community for the next 5 years, but the funds at that time were insufficient. To overcome this, Abdul Hadi issued a policy to invite the whole community to work together in development, until in 1976 this development was completed. Another example of major development is the construction of the Gajah Mada to Kaliwates double way road. This development also involved the community in it, from joint discussions to the voluntary eviction of community houses. With the developments that have been carried out, Jember Regency has obtained facilities and better quality of life of the community.*

Keywords: Abdul Hadi, Military, Leadership, Paternalistic.

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

1. Pendahuluan

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Seseorang dapat disebut pemimpin jika ia dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, meskipun tidak ada ikatan-ikatan yang formal dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan akan timbul dimanapun, asalkan tiga unsur seperti adanya orang yang mempengaruhi, adanya orang yang dipengaruhi, orang yang mempengaruhi mengarahkan kepada tercapainya sesuatu tujuan dapat terpenuhi (Y. W. Sunindhia 1993: 4-5).

Peran pemimpin dalam pengabdian dirinya pada saat memimpin suatu lembaga pemerintahan dapat mendorong kemunculan pemimpin pemerintahan sebagai seorang tokoh sejarah di tengah-tengah masyarakat. Adanya ide-ide serta semangat yang besar dari pemimpin untuk memecahkan masalah-masalah dalam tugasnya merupakan sebuah tanda bahwa kecerdasan dan totalitas pemimpin sangat berarti bagi masyarakat yang dipimpin. Salah satu faktor sebab-sebab kemunculan seseorang di atas panggung sejarah sebagai tokoh masyarakat karena keberhasilannya mengadakan perubahan ke arah perbaikan (Anhar Gonggong 1993: 1).

Letkol Inf. Abdul Hadi adalah tokoh yang berasal dari Jember dan sangat terkenal di kalangan masyarakat Jember. Abdul Hadi merupakan Bupati Jember ke-10 yang menjabat selama dua periode, yaitu mulai tahun 1968-1973 dan 1973-1979. Letkol Inf. Abdul Hadi lahir di Probolinggo pada tanggal 2 April 1926, memiliki istri bernama Rahayu yang lahir di Madiun pada 18 Juli 1930 dan dikaruniai anak, yaitu Aminah, Achmad, Arifah, Nuryani, Aryono, Arif Rahman Hadi. Abdul Hadi memiliki banyak pengalaman dalam bidang militer, sebelum menjabat sebagai bupati, ia berpindah-pindah batalyon seperti pada Batalyon 518 Madiun, Batalyon 516, hingga akhirnya ia menjadi Komandan Kodim 0824 Jember. Kepemimpinan Abdul Hadi sebagai bupati terfokus pada pembangunan infrastruktur. Prinsip gotong royong dilakukan dalam melaksanakan pembangunan hingga Abdul Hadi di kalangan masyarakat Jember terkenal sebagai bupati yang penuh motivasi dan merakyat. Sanjungan tersebut ia dapatkan karena peran kepemimpinannya mampu membawa banyak perubahan pada Kabupaten Jember. Abdul Hadi menjadi motivasi masyarakat Jember untuk melakukan pembangunan berdasar dengan sikap gotong royong. Terbukti dengan adanya ajaran

tersebut pembangunan Kabupaten Jember pada masa kepemimpinan Abdul Hadi terlaksana dengan baik. Beberapa contoh pembangunan yang dilaksanakan antara lain: pembangunan Masjid Al-Baitul Amien, pembentukan Kota Administratif Jember, pembangunan Kantor Pemerintah Daerah, pelebaran jalan, dan penetapan lambang daerah Kabupaten Jember.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana latar belakang kehidupan Abdul Hadi sebelum menjadi Bupati?, (2) Bagaimana kepemimpinan Bupati Abdul Hadi dalam pembangunan Kabupaten Jember?, (3) Apa dampak pembangunan masa pemerintahan Abdul Hadi dan pandangan masyarakat terhadap Abdul Hadi?.

Kajian ini bertujuan : (1) Mengetahui latar belakang kehidupan Abdul Hadi sebelum menjadi Bupati, (2) Memahami kepemimpinan Abdul Hadi dalam pembangunan Kabupaten Jember, (3) Mengetahui dampak pembangunan yang telah dilakukan di masa pemerintahan Abdul Hadi dan pandangan masyarakat terhadap Abdul Hadi.. Ruang lingkup tulisan ini terdiri atas lingkup spasial dan temporal. Lingkup spasial dalam karya ini adalah Kabupaten Jember. Pemilihan lingkup spasial dengan alasan bahwa tulisan ini terfokus pada kepemimpinan salah satu Bupati Kabupaten Jember bernama Abdul Hadi yang mengabdikan dirinya sebagai Bupati Jember selama dua periode. Lingkup temporal tahun 1968-1979 dengan alasan Abdul Hadi terpilih dan membangun Kabupaten Jember pada tahun tersebut. Tahun 1968 dipilih sebagai batasan awal penelitian dengan maksud, pada tahun tersebut Abdul Hadi mulai diangkat menjadi Bupati, kemudian tulisan ini diakhiri pada tahun 1979 dikarenakan ia menjabat sebagai bupati selama dua periode yang berakhir tepat pada tahun 1979 masa jabatannya.

Lingkup kajian pada tulisan ini adalah sejarah dalam bentuk biografi. Biografi merupakan riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain baik tokoh tersebut masih hidup atapun telah meninggal, yang menarasikan mengenai peristiwa-peristiwa sejarah Abdul Hadi sebagai bagian dari proses pembentukan jiwa kepemimpinan Abdul Hadi, baik sebelum menjadi bupati hingga menjadi Bupati Jember. Ketika menjabat sebagai bupati terdapat berbagai kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Jember sebagai realisasi dari kepemimpinan Abdul Hadi.

2. Metode Penelitian

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

Penelitian ini menggunakan metode sejarah karena subjek penetian termasuk dalam kajian sejarah. Menurut Louis Gottschalk (1980: 18-19), metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode sejarah terdapat empat tahapan yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (kritik intern dan kritik ekstern), penafsiran sumber (interpretasi), serta penulisan sejarah (histiografi).

Heuristik adalah pengumpulan sumber berupa hasil wawancara, artikel, arsip atau dokumen yang sezaman dengan objek yang diteliti. Sumber yang sudah dikategorikan menjadi dua macam yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber langsung dari pelaku sejarah atau yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Sumber primer dapat dilakukan dengan sejarah lisan atau wawancara. Penulis menggunakan metode sejarah lisan untuk wawancara dengan saksi hidup yang sejaman sebagai pelaku sejarah. Sumber Primer juga didapatkan melalui sumber dokumen yang ditemukan penulis. Sumber dokumen tersebut seperti foto, piagam penghargaan dan surat-surat keputusan. Sumber sekunder bisa didapat dari berbagai buku-buku perpustakaan yang mempunyai sangkut paut terhadap permasalahan yang ditulis. Sumber sekunder ini dapat diperoleh penulis dari perpustakaan daerah, skripsi, jurnal yang mendukung. Beberapa yang sudah dilakukan oleh penulis seperti wawancara dengan anak dari Abdul Hadi, selain itu juga penulis mendapatkan sumber wawancara dari mantan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di masa Abdul Hadi.

Tahap kedua yaitu kritik sumber atau tahapan penelitian untuk memilah-milah sumber sejarah yang dapat digunakan sebagai referensi. Kritik sumber dibagi menjadi dua yakni: kritik intern dan kritek ekstern. Kritik intern untuk mengukur keterikatan isi tulisan data sejarah yang dapat dipercaya. Sedangkan kritik ekstern yaitu untuk melihat kondisi verbal seperti pengarang dan keasliannya tidak dapat diragukan lagi. Hal ini ditujukan untuk menyeleksi sehingga diperoleh fakta. Pada tahapan ini, semua data yang berkaitan dengan kepemimpinan Abdul Hadi berupa proses serta hasil fisik dan non-fisik yang telah terkumpul (wawancara, buku, skripsi dan data lainnya) dipilih, dinilai diseleksi dan dicari kebenaran, keaslian dan keutuhannya, sehingga penulis mendapatkan hasil yang relevan dan kronologis untuk di tulis.

Setelah dilakukan kritik sumber tahap ketiga, selanjutnya penulis melakukan penafsiran (interpretasi) tentang aspek yang akan ditulis. Tahap ketiga yaitu interpretasi, merupakan upaya penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data yang valid atau proses analisis dari data yang kemudian disusun menjadi sebuah kontruksi suatu peristiwa yang utuh tanpa adanya unsur subjektivitas dan mendekati kebenaran. Interpretasi dilakukan dengan merangkaikan sumber-sumber sejarah, baik berupa sumber lisan, sumber arsip, maupun dokumen yang dikaitkan sumber sejarah satu dengan sumber sejarah yang lainuntuk mencapai suatu kesatuan fakta. Interpretasi dapat berbeda dipengaruhi oleh pengaruh, motivasi, dan pola pikir peneliti. Penulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis yaitu bentuk penulisan yang berusaha memaparkan dan menjelaskan permasalahan yang hendak dihadapi dengan penganalisis secara kritis terhadap sumber penulisan yang sudah diperoleh sehingga menghasilkan data yang dapat dipercaya kebenarannya.

Tahap keempat adalah historiografi, merupakan penyusunan sumber-sumber yang dianggap valid dan kredibel setelah melalui proses tiga tahapan di atas menjadi sebuah tulisan. Pada akhirnya, semua sumber yang terkait dengan penelitian dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah guna rekonstruksi masa lampau yang menjadi kajian, dalam bentuk penulisan sejarah yang sistematis, logis, dan ilmiah. Langkah ini disebut historiografi, dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam buku ilmiah sehingga diperoleh bentuk penulisan sejarah yang deskriptif analitis. Deskriptif analistis adalah penulisan yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu yang disertai dengan analisis kritis, mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Riwayat Hidup dan Karir Sebelum Menjadi Bupati

Abdul Hadi lahir di Probolinggo pada tanggal 2 April 1926, ia dilahirkan dari pasangan suami istri bernama Arjokusumo dan Kasni. Semasa kecil Abdul Hadi bertempat tinggal di daerah Stasiun Jati Kabupaten Probolinggo yang saat ini telah dinonaktifkan. Sedari kecil Abdul Hadi terlihat memiliki karakter yang pemberani, mandiri, dan bertanggungjawab. Kehidupannya ia habiskan untuk tinggal di dalam masjid bersama teman-temannya. Hingga pada suatu hari keluarganya terkena musibah terjangkit penyakit TBC, karena tidak menetap di rumah, Abdul Hadi tidak tertular

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

penyakit tersebut. Penyakit ini merenggut 10 saudara kandung Abdul Hadi yang saat itu masih berumur sangat muda, dan 1 adiknya meninggal di umur tua dengan penyakit yang sama (Nuryani Jember 25 Oktober 2019).

Abdul Hadi memulai pendidikan formal di HIS (Hollandsch Inlandsche School). Setelah Abdul Hadi dinyatakan lulus dari HIS, selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di MULO. Pendidikannya tidak berlanjut pada jenjang lebih tinggi, setelah lulus dari MULO Abdul Hadi masuk dalam dunia militer. Tanpa seizin orang tua, Abdul Hadi mendaftar sebagai tentara angkatan laut yang kemudian berpindah pada angkatan darat.

Menurut putra Abdul Hadi yang bernama Achmad Rahman Hadi, Abdul Hadi sebelum menjadi perwira Angkatan Darat, ia tergabung dalam kesatuan Angkatan Laut di Surabaya. Ketika masih tergabung dalam kesatuan Angkatan Laut, ia tergabung dalam beberapa perang kemerdekaan. Abdul Hadi juga tergabung dalam perang gerilya dalam membela kemerdekaan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan adanya Tanda Jasa Pahlawan atas jasanya dalam perjuangan gerilya yang diberikan oleh Soekarno sebagai Presiden dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemudian di tahun 1947 Abdul Hadi tergabung dalam Agresi Militer Belanda I, dalam kurun waktu satu tahun kemudian bertugas kembali mengikuti perang Agresi Militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948.

Setelah bergabungnya Abdul Hadi pada Agresi Militer Belanda II, Abdul Hadi mengikuti Pendidikan SECAPA (Sekolah Calon Perwira) dengan berpindah matra ke darat, setelah ia dinyatakan lulus dalam pendidikan tersebut, Abdul Hadi mendapatkan pangkat Letda (Letnan Dua). Dalam percabangannya, Abdul Hadi mengikuti pelatihan pendidikan radio-telegrafie/radio-telefonie/radio-monteur atau Komando Seksi PHB, pelatihan tersebut ia ikuti selama 6 bulan. Pelatihan ini dilaksanakan di Pendidikan Detasemen Perhubungan Terr. V. Angkatan Darat dimulai pada tanggal 15 Januari 1951 hingga 21 Juli 1951. Kelulusannya dalam SECAPA dan Pelatihan Komando Seksi PHB tersebut sebagai bentuk perpindahan matra Abdul Hadi yang berawal dari matra laut menjadi matra darat, kemudian Abdul Hadi tergabung dalam kesatuan Batalyon 518 di Madiun (saat ini telah diubah menjadi Batalyon Infanteri Para Raider 501/Bajra Yudha). Di tahun yang sama Abdul Hadi mendapatkan pangkat efektif yang diberikan oleh Kepala Staf “A” Angkatan Darat Kol. Inf. R. Suhud Prawiroatmodjo, tepatnya pada

tanggal 1 Oktober 1951. Pada tahun 1952 Abdul Hadi kembali dikirim menjadi gabungan prajurit pemberantasan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.

Dalam perpidahannya di Batalyon Madiun, ia bertemu dengan wanita yang selanjutnya ia jadikan sebagai pendamping hidupnya. Wanita tersebut bernama Rahayu yang berasal dari Kabupaten Madiun. Berpangkat Letnan Dua dan tepat pada tanggal 28 Februari 1953 ia menikahi Rahayu di Madiun. Abdul Hadi dan Rahayu bertemu ketika Abdul Hadi dipindahtugaskan di Batalyon Madiun. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai enam anak, pada tahun 1953 Abdul Hadi bersama istri mengadopsi Arifah Rahayu Hadi sebagai anak angkat, kemudian tahun 1954 lahir anak pertama yang bernama Aminah Rachmaniar Hadi, tahun 1956 lahir anak kedua bernama Achmad Rahman Hadi, tahun 1959 lahir anak ketiga Arif Rahmad Hadi, anak keempat bernama Ariyani Rachmi Hadi lahir pada tahun 1961, dan anak bungsu lahir pada tahun 1966 bernama Ariyono Rahman Hadi. Pada tahun 1954 Abdul Hadi diangkat menjadi Komandan Kompi dengan pangkat Lettu (Letnan Satu) di Batalyon 518. Selanjutnya Abdul Hadi berpindah kesatuan, ia berpindah pada kesatuan Batalyon 516 yang saat itu tergabung menjadi bagian dari Resimen 17 yang berkedudukan di Mojokerto. Hingga pada tahun 1958, Abdul Hadi mengikuti Pendidikan Pendahuluan Ulangan Perwira (PPUP) di Batalyon Depot Infanteri VI. Pendidikan tersebut berlangsung selama 3 bulan, dimulai tanggal 20 Oktober hingga 31 Desember 1958. Pada pelatihan tersebut Abdul Hadi berpindah kecabangan, yang semula tergabung dalam PHB berpindah menjadi Infanteri. Kemudian pada tahun 1960 Abdul Hadi mengikuti kursus “a” dengan pangkat Letnan Satu. Pada tahun 1963 Abdul Hadi pindah kesatuan pada Batalyon 527 Lumajang, di kesatuan tersebut Abdul Hadi memangku jabatan sebagai WADANYON (Wakil Komandan Batalyon). Abdul Hadi kemudian ditugaskan dalam penumpasan pemberontakan G 30S tahun 1965.

Pada tahun 1966, Abdul Hadi kembali menempuh kursus Pendidikan Lanjutan Perwira Infanteri (DIKLAPA IF. I), pendidikan tersebut berlangsung selama 6 bulan dari 13 Juni 1966 hingga 5 Januari 1967, ia dinyatakan lulus dengan mendapatkan pangkat Mayor. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1967 Abdul Hadi tergabung dalam kesatuan Batalyon Infanteri Mekanis 512 sebagai Komandan Batalyon. Bergabungnya Abdul Hadi dalam kesatuan tersebut dan menjadi Komandan Batalyon berselang selama satu tahun. Hingga pada 4 Maret 1968 Abdul Hadi berhenti menjadi Komandan

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

Batalyon 512 dan berpindah tugasdi Kodim 0824 Jember. Pada Kodim 0824 ia menjabat sebagai DANDIM (Komandan Kodim) dengan pangkat Letnan Kolonel (Letkol). Perpindahannya ke Kodim 0824menjadi awal mula Abdul Hadi mengenal Jember. Tak berselang lama, yaitu dalam waktu tiga bulan ia dipilih oleh DPRDGR sebagai Bupai Kepala Daerah Kabupaten Jember periode 1968-1974 secara aklamasi.

3.2 Proses Pencalonan Menjadi Bupati

Birokrasi pada masa Orde Baru terlihat kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan, yaitu Golkar. Golkar merupakan organisasi politik yang berjaya pada masa Orde Baru. Kejayaan tersebut dapat dilihat dari kemenangan-kemenangan Golkar pada setiap pemilu Orde Baru. Strategi yang digunakan dalam memenangkan pemilu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak seperti, ABRI, birokrasi, organisasi massa, dan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam lembaga politik seperti DPR, dibentuklah fraksi khusus untuk ABRI yang sebelumnya tidak terdapat dalam sistem politik Indonesia. Terjadi polarisasi politik yang diperketat menuju ke pola dominasi militer dan Golongan Karya (Golkar) (Nofiah Iffatun Nisa' 2015: 45-46).

Abdul Hadi menjadi Bupati Jember periode pertama pada tahun 1968 hingga 1973, sebelumnya ditunjuk Pejabat Kepala Daerah Kabupaten Jember Hoesein Dipotroeno oleh Gubernur Jawa Timur dan menjabat selama satu tahun, berakhir ketika DPRDGR membentuk panitia teknis pencalonan bupati deknitif. Pada tanggal 24 Juli 1968 DPRDGR Kabupaten Jember dalam rapat paripurna menetapkan Abdul Hadi sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Jember secara aklamasi (SK DPRDGR 24 Juli 1968), selanjutnya diusulkan penetapan dan pengangkatannya kepada pemerintah pusat.

3.3 Pembangunan Pada Periode I (1968-1973)

Abdul Hadi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jember di masa Orde Baru, dimana pembangunan negara disusun dalam suatu pola pembangunan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) (CST. Kasil 1970:12). Sasaran rencana pembangunan tersebut, yaitu: pangan, sandang, perbaikan prasarana, penyediaan rumah rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rohani.

Dalam pelaksanaan pembangunan ini bertitik berat pada bidang infrastruktur, dikarenakan pembangunan dalam bidang lain dapat berjalan lancar apabila fasilitas dapat terpenuhi.

Dalam masyarakat, ia dikenal sebagai pemimpin yang memiliki hubungan harmonis dengan rakyat. Setelah terjadinya pemberontakan G 30S tahun 1965, banyak masyarakat takut dengan sesuatu yang berbau kemiliteran. Hal tersebut disebabkan bahwa militer terlibat dalam penumpasan masyarakat yang terlibat dalam sesuatu yang berbau PKI. Muncul rasa takut pada tentara maupun polisi karena mereka menganggap tentara dan polisi adalah pihak yang bertanggung jawab atas penculikan warga saat penumpasan PKI berlangsung. Melihat perasaan trauma yang terjadi di dalam masyarakat setelah terjadinya peristiwa G 30S tahun 1965, Abdul Hadi sebagai Bupati Kabupaten Jember mencoba menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang berasal dari kemiliteran. Ia mendekati masyarakat dengan cara berkeliling di desa-desa. Pada kesempatan tertentu, dengan menggunakan sepeda dan didampingi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengelilingi desa untuk bersapa dan berbincang dengan masyarakat. Hal ini juga ia gunakan sebagai pengenalan keadaan geografis Kabupaten Jember, kegiatan ini biasa disebut *cross country* oleh pemerintah daerah di masa Abdul Hadi.

Abdul Hadi merupakan Bupati Kabupaten Jember yang memiliki gaya kepemimpinan paternalistis dengan ciri-ciri kebapakan. Dalam setiap pembangunannya, Abdul Hadi selalu melibatkan masyarakat. Menurutnya masyarakat harus mendapat bagian dalam proses pembangunan, sehingga mampu menumbuhkan paham yang sama antara pemimpin dan rakyatnya, hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun suatu daerah. Dalam Harian Suara Rakyat edisi pagi tanggal 1 September 1972 tercatat terdapat 1559 proyek bangunan. Pembangunan pada tahun 1971-1972 ditujukan pada perbaikan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya dalam kota, melainkan dilakukan juga di luar Kota Jember. Pembangunan-pembangunan tersebut dilakukan menggunakan dana yang berasal dari subsidi pemerintah dan swadaya masyarakat, dikarenakan pada tahun tersebut pemasukan dana dari pemerintah tidak dapat memenuhi banyaknya kebutuhan pembangunan, untuk itu masyarakat dilibatkan dalam penggalangan dana hingga proses pembangunan. Namun walaupun dalam kepemimpinannya ia dikenal dengan pembangunan infrastruktur, Abdul Hadi juga

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

melakukan pembenahan dalam bidang lainnya. Bidang kesehatan, pertanian, dll. juga tak lepas dalam pembangunan pada dua periode masa kepemimpinannya.

Hal yang pertama Abdul Hadi lakukan ketika telah menjabat sebagai Bupati adalah penertiban kepegawaian. Berbagai peraturan dan pembinaan mulai dari cara berpakaian, ketepatan waktu, dan penyesuaian pekerjaan pada bidang masing-masing, hal-hal yang menyangkut kepegawaian dan kebijakan digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Dalam melakukan pembinaan, Abdul Hadi selaku Bupati Kabupaten Jember secara rutin melakukan pembinaan dan pengarahan melalui acara apel dan upacara diselenggarakan tiap hari Senin di halaman depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebelum jam kantor berlangsung, dan setiap harinya pegawai diwajibkan memakai pakaian yang rapi, memakai seragam disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan, dan diwajibkan menggunakan sepatu.

3.4 Pembangunan Jalan dan Gedung Pemerintah Daerah

Pada tahun 1968 pemerintah daerah membentuk Team Operasi Binamarga Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan pembangunan berupa perbaikan jalan dan pembukaan wilayah terisolir (Salinan SK Bupati tahun 1968). Dimulai dengan membuka kawasan pinggir kota yang masih terisolir. Tempat yang terisolir ialah Talangsari dan Tegal Besar, hal tersebut disebabkan terdapat Sungai Bedadung yang memisahkan wilayah ini dengan bagian kota, maka dibangunlah jembatan yang menghubungkan Tegal Besar dan Talangsari. Saluran air menuju Sungai Bedadung juga dibangun untuk menghindari genangan air dan banjir dikarenakan kawasan tersebut daerah persawahan.

Kemudian pelebaran jalan dilakukan dalam kota, sebanyak 14 wilayah dalam kota yang tercantum dalam SK DPRDGR dari Jl. Raya Sultan Agung hingga Jl. Diponegoro (Lampiran SK DPRDGR tanggal 26 Desember 1968). Pelebaran juga dilakukan pada jalan menuju kota yaitu wilayah Kaliwates hingga Gajah Mada. Namun pada kawasan tersebut Abdul Hadi memprediksi di kemudian hari akan terjadi padatnya lalu lintas, maka dari itu khusus wilayah Kaliwates hingga Gajah Mada dibangunlah double way untuk memudahkan arus lalu lintas. Mulanya pembangunan ini disebut sebagai proyek pregtisius Abdul Hadi, namun dengan berdiskusi bersama tokoh dan masyarakat setempat Abdul Hadi mampu mendapatkan izin dan kepercayaan melanjutkan proyek pembangunan ini. Dana APBD, APBN dan gotong royong warga

yang secara sukarela merelakan pertokoan dan rumah di pinggiran kawasan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Selanjutnya untuk pembangunan yang merata, Abdul Hadi juga tidak melupakan kawasan di luar kota. Tercatat pada tahun 1972 terdapat 23 pembangunan jalan untuk luar wilayah Kota Jember (*Suara Rakyat* Edisi Pagi 4 September 1972).

Seiring pembangunan jalan dilakukan di dalam maupun luar kota, Abdul Hadi juga melakukan pembangunan fisik kebutuhan layanan masyarakat, contoh pembangunan kantor pemerintah daerah. Pembangunan ini bermula dari kebijakan Abdul Hadi yang menginginkan untuk memperbarui gedung pemda dikarenakan gedung lama tidak lagi dapat menampung kebutuhan layanan masyarakat yang semakin bertambah. Abdul Hadi menginginkan sebuah bangunan megah yang nantinya bisa menjadi salah satu ikon Kabupaten Jember. Pada tanggal 16 September 1969 dibangunlah Kantor Pemerintah Daerah menggunakan biaya yang berasal dari APBD Kabupaten Jember sebanyak Rp. 131.300.000 (SK DPRDGR tanggal 16 September 1969). Namun dalam pelaksanaannya ternyata menghabiskan biaya yang lebih besar, hingga pada tanggal 10 Maret 1971 DPRDGR mengeluarkan SK tambahan biaya pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sebanyak Rp. 20.000.000,-, selain itu biaya pembangunan ini juga diperoleh dari sumbangan swadaya masyarakat dengan cara mengumpulkan dana secara gotong royong (SK DPRDGR 10 Maret 1971). Pembangunan kantor pemerintah daerah terselesaikan pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.

Selain itu, di dalam kota juga dibangun SPBU sebagai perusahan yang nantinya keuntungan ditujukan untuk masuk dalam kas daerah. SPBU ini dibangun di utara alun-alun Kabupaten Jember, yang kemudian dipindahkan di daerah Sukorejo seluas 200m². Dibangun menggunakan APBD dengan modal Rp. 5.000.000,- tempat ini dipilih dengan alasan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, misalnya masyarakat yang datang dari arah Banyuwangi tanpa harus menuju kota (Bambang Hariono, dkk. 2010: 147).

3.5 Bidang Pendidikan dan Pembinaan Olahraga

Pendidikan adalah salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, bertujuan untuk membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air (UU Pasal 3 No. 4 Tahun 1950). Pada era 1970-an pemerintah sangat peduli terhadap

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

pengembangan dan peningkatan di bidang pendidikan. Dengan sistem dan pola pendidikan yang baik maka akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara layak dan memadai. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan saat itu dengan melakukan pembangunan gedung sekolah (khususnya sekolah dasar) melalui proyek inpres dengan dana APBD tahun 1969 sebesar Rp. 3.500.000 (*Suara Rakyat* edisi tanggal 4 September 1972), dan pembukaan kawasan pendidikan di Tegalboto. Pembangunan gedung sekolah tidak hanya terbatas di wilayah kecamatan yang relatif mudah dijangkau tetapi juga di wilayah pedesaan. Setiap desa mendapatkan sebuah SD Inpres. Demi mensukseskan program tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember hingga jajaran aparat pemerintah desa turut serta dalam pembangunan, misalnya mereka bertugas menyediakan lahan untuk pembangunan gedung. Selain itu pemerintah juga meningkatkan jumlah tenaga pendidik. Tahun 1970-an semakin banyak tenaga guru yang berasal dari luar Kabupaten Jember, lulusan SPGN dan PGAN Jember tidak mencukupi kebutuhan tenaga pendidik, oleh sebab itu lulusan SPG dan PGA dari berbagai lain, seperti Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, dan Banyuwangi banyak yang memperoleh angkatan sebagai PNS di Jember (Bambang Hariono, dkk. 2018: 160-161).

Selain itu untuk mengembangkan masyarakat setempat, pemerintah daerah juga mendukung masyarakat dalam melakukan minat olahraga bulutangkis yang saat itu menjadi cabang olahraga dengan banyak peminat paling banyak. Bermula dari salah satu bintang nasional Mulyadi yang berasal dari Jember, masyarakat termotivasi untuk mengikutinya. Melihat respon masyarakat yang antusias terhadap cabang olahraga tersebut, pemerintah daerah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan fasilitas masyarakat. Hingga akhirnya pemerintah membangun gedung olahraga bulutangkis yang terletak di terminal lama Jember dengan nama Gedung Bulutangkis Argopuro yang dibangun menggunakan APBD dan terselesaikan pada tahun 1976. Abdul Hadi sebagai Bupati Kabupaten Jember juga meminta Mulyadi untuk menjadi pelatih, setelah Mulyadi menghentikan aktivitasnya sebagai atlet nasional.

3.6 Penetapan Lambang Daerah

Sejak terbentuknya hingga masa pemerintahan Abdul Hadi, Kabupaten Jember belum memiliki lambing daerah sebagai identitas. Maka pemerintah daerah saat itu berinisiatif untuk membuat lambing daerah sebagai perwujudan identitas kedaerahan. Pada tanggal 23 Oktober 1968 DPRDGR mengadakan sidang pleno membahas pembentukan atau pembuatan lambing daerah, dengan hasil akan mengadakan perlombaan yang dikelola oleh panitia terbentuk.

Di dalam perlombaan, dilakukan seleksi dengan cara setiap peserta menjelaskan atas logo yang mereka usung. Setelah mendengar peserta dalam menyampaikan hasil karyanya, tim pelaksana perlombaan menetapkan lambang daerah ciptaan Iskak Effendy yang bekerja sebagai guru SPG Negeri menjadi pemenang. Namun hasil ciptaan tersebut tidak langsung ditetapkan sebagai logo Kabupaten Jember, melainkan dalam proses penetapannya dilakukan beberapa perubahan dan penyempurnaan hingga terbentuk logo yang digunakan hingga saat ini. Penyempurnaan ini dilakukan oleh Sadino Sasongko Pamlih seorang pembuat lambang yang berasal dari Solo (Mashuri Tohir, Jember 08 Maret 2020). Selanjutnya lambang tersebut dikirim ke pemerintah pusat dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 November 1970 (Salinan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 3 November 1970). Pada 31 Agustus 1970 DPRDGR mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.4 berisi tentang lambang daerah/logo. Perda tersebut menjelaskan bentuk, isi, warna, makna, sesanti, penggunaan, dan larangan. Pada pasal 1-2 bentuk dan makna logo tersebut dijelaskan yang terdiri dari daun perisai, bintang bersudut lima, butir padi, segi lima putih, daun tembakau, dan gambar kantor pemerintah daerah (Perda Kabupaten Jember No. 4 Tahun 1970).

3.7 Bidang Ekonomi

Masyarakat Kabupaten Jember memiliki mata pencaharian dengan mayoritas sebagai petani. Pada masa era Orde Baru pemerirntah berorientasi pada perbaikan ekonomi yang direncanakan dalam program REPELITA. Dengan itu pemerintah daerah Kabupaten Jembr juga berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Jember yang bermatapencaharian petani.

Mulanya pemerintah daerah membantu masyarakat dengan membangun irigasi untuk area persawahan. Terutama pada wilayah kering seperti di Jember Utara. Pada tahun 1971 wilayah Desa Candijati dan Baratan dibangun *verdeelwek* untuk

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

melancarkan pengairan (Daftar Rencana Pembangunan Agraris tahun 1971 Kabupaten Jember). Di Kecamatan Sukowono Desa Arjasa dibangun pembagi pengairan dan tangkis dengan biaya subsidi Rp. 100.000 dan swadaya masyarakat Rp. 125.000.

Selain itu untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah juga membangun tempat terjadinya pertukaran perkenomian yaitu pasar. Selain menjadi petani, sebagian masyarakat Jember juga menjadi pedagang.

Pada tahun 1930-an wilayah Pasar Tanjung hingga Jl. Sultan Agung merupakan pusat perdagangan dan hiburan masyarakat (*Kompasiana* diakses pada tanggal 15 November 2020). Namun keadaan Pasar Tanjung saat itu tidak mampu menampung banyaknya pedagang dan pembeli yang semakin ramai. Maka pada tahun 1971 melalui SK DPRGR diputuskan untuk melakukan *upgrading* Pasar Tanjung. Pembaharuan ini menggunakan dana yang berasal dari pemerintah sebanyak Rp. 400.000 dan masyarakat, dengan ketentuan biaya dibebankan kepada para penghuni masing-masing 25% dan 75% (SK DPRDGR tanggal 20 September 1971). Hasil dari *upgrading* tersebut, Pasar Tanjung memiliki 2 lantai yang terdiri dari lantai 1 merupakan bangunan los untuk pedagang buah, sayur, dan peralatan dapur, sedangkan lantai 2 merupakan kios permanen pedagang macam-macam pakaian dan barang-barang elektronik (Luthfia Nurjannah 2015: 03). Proyek pembangunan ini terselesaikan pada tahun 1976.

3.8 Pembangunan Masjid Al Baitul Amien Jember

Menurut catatan Departemen Agama Kabupaten Jember tercatat bahwa sekitar 98.59% penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember memeluk agama Islam. Tidak banyak tempat ibadah untuk menampung masyarakat beribadah pada saat itu. Hal ini juga terjadi pada Masjid Jami' Kota Jember yang tidak mampu lagi menampung jamaah, di setiap sholat Jum'at diadakan, jamaah selalu melebihi tempat yang tersedia hingga memenuhi Jalan Kartini yang terletak di sebelah barat alun-alun (Kober diakses pada tanggal 20-10-2020).

Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember telah dibangun sejak zaman Kolonial Belanda pada tanggal 19 Desember 1894 dengan luas 2760 meter^2. Kemudian masjid tersebut mengalami renovasi pada tahun 1939 sebelum perang dunia II. Lalu mengalami renovasi pada tahun 1972 dengan gagasan yang diberikan oleh Abdul Hadi selaku Kepala Daerah Kabupaten Jember. Pada tanggal 13 Juli 1972 Abdul Hadi mengundang

para Kyai dan tokoh masyarakat untuk musyawarah tentang pembangunan masjid (Moch. Ichsan BA dan Zainal Anshari 2017: 27).

Dalam keterbatasan dana Abdul Hadi tetap menginginkan gagasan tersebut terwujudkan. Pada awalnya gagasan tersebut mendapatkan banyak tentangan, karena dikhawatirkan akan menghilangkan amal jariah para pendahulu yang telah membangun masjid jami' lama (Liputan6 diakses pada tanggal 21-10-2020). Namun akhirnya, pada 17 Juli 1972 jawaban para kyai menyetujui hal tersebut dan disampaikan secara tertulis yang ditandatangani atas nama para kyai antara lain K.H. Umar (Sumber Wringin), K.H. Abdullah Yakin (Mlokorejo), K.H. Danial Adimenggala, K.H. Dhofir Salam (Jember), K.H. Djauhari Zawawi (Kencong) (Moch. Ichsan BA dan Zainal Anshari 2017: 28) dengan syarat tidak membongkar masjid lama dan dibuatkan jembatan sebagai penghubung antara bangunan masjid baru dengan bangunan masjid lama (Liputan6 diakses pada tanggal 21-10-2020). Setelah adanya persetujuan tersebut maka dibentuklah Panitia Pusat Pembangunan Masjid Jami' Jember (SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II tanggal 25 Oktober 1972).

Pada HUT RI tahun 1972 panitia mengutarakan gagasan pembangunan masjid yang ditujukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut tertuang dalam buku buku saran dan pendapat rencana pembangunan Masjid Jami', terdapat 13 macam konsep Masjid yang disarankan masyarakat, namun hal tersebut dipandang belum memenuhi syarat oleh panitia. Hingga akhirnya terpilih konsep milik Yaying K. Keser A.I.A sebagai arsitek dengan tamatan California dengan berbagai alasan (Moch. Ichsan BA dan Zainal Anshari 2017: 37-39).

Persoalan utama yang dihadapi oleh panitia adalah dana yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pembangunan masjid. Demi memenuhi biaya besar yang dibutuhkan, panitia mengumpulkan dana melalui sumbangan-sumbangan yang diberikan masyarakat. Penggalian dana untuk pembangunan Masjid Jami' Jember dipimpin oleh Mayor H. Moch Syariin selaku Ketua Seksi Dana Panitia Pusat Pembangunan Masjid Jami' Jember dengan cara menghimpun sumbangan masyarakat yang memiliki sawah berupa padi/gabah sebanyak satu kwintal per hektar selama dua musim, pengumpulan sumbangan dari blanko infaq, sumbangan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha Tembakau, Calon Haji, Organisasi, NCTR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk lewat Departemen Agama), dan peorangan, bantuan dari Menteri Dalam

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

Negeri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Kober diakses pada tanggal 21-10-2020). Pembangunan tersebut terselesaikan pada tanggal 3 Mei 1976 diresmikan oleh Menteri Agama RI Prof. KH.Mukti Ali dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.

No.	Jenis Sumbangan	Nilai
1.	Padi/gabah petani	Rp. 518.791.483,20
2.	Blanko infaq sukarela	Rp. 38.520.461.50
3.	PNS, Pengusaha, dll.	Rp. 145.530.878.98
4.	Menteri Dalam Negeri	Rp. 25.000.000.00
5.	Pemerintah Daerah Kab. Jember	Rp. 61.500.000.00
	JUMLAH	**Rp. 789.342.823.68**

Tabel 1. Rekapitulasi Pemasukan Dana

Sumber: Sejarah Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember 2017

3.9 Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Jember pada masa Bupati Abdul Hadi. Hal itu disebabkan adanya tuntutan dan meningkatnya jumlah penduduk. Maka Pemerintah Kabupaten Jember membangun sarana Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Kesehatan Desa yang digunakan untuk masyarakat Jember dan sekitarnya.

Diketahui pada tahun 1970 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibangun balai-balai kesehatan untuk desa, biaya rincian sebagai berikut:

No.	Nama Balai	Jumlah Biaya
1.	Balai Kesehatan Gigi Jember	Rp. 144.000,-
2.	Balai Kesehatan Gigi Balung	Rp. 172.000,-
3.	Balai Kesehatan Gigi Kalisat	Rp. 124.000,-
4.	Balai Kesehatan Mata Jember	Rp. 172.000,-
5.	Rumah Sakit dr. Soebandi Jember	Rp. 176.800,-
6.	Rumah Sakit Balung	Rp. 119.200,-
7.	Balai Kesehatan Sumbersari	Rp. 161.280,-
8.	Balai Kesehatan Wirolegi	Rp. 57.600,-
9.	Balai Kesehatan Arjasa	Rp. 43.200,-

10.	Balai Kesehatan Gebang	Rp. 81.600,-
11.	Balai Kesehatan Wringintelu	Rp. 14.400,-
12.	Balai Kesehatan Ambulu	Rp. 172.000,-
13.	Balai Kesehatan Wuluhan	Rp. 196.000,-
14.	Balai Kesehatan Rambipuji	Rp. 143.200,-
15.	Balai Kesehatan Panti	Rp. 33.600,-
16.	Balai Kesehatan Jenggawah	Rp. 33.600,-
17.	Balai Kesehatan Mangli	Rp. 19.200,-
18.	Balai Kesehatan Tanggul	Rp. 240.000,-
19.	Balai Kesehatan Bangsalsari	Rp. 67.200,-
20.	Balai Kesehatan Sumberbaru	Rp. 14.400,-
21.	Balai Kesehatan Mayang	Rp. 72.000,-
22.	Balai Kesehatan Mumbulsari	Rp. 57.600,-
23.	Balai Kesehatan Sempolan	Rp. 43.200,-
24.	Balai Kesehatan Ledokombo	Rp. 14.400,-
25.	Balai Kesehatan Tempurejo	Rp. 48.000,-
26.	Balai Kesehatan Puger	Rp. 43.200,-
27.	Balai Kesehatan Gumukmas	Rp. 38.400,-
28.	Balai Kesehatan Kencong	Rp. 220.000,-
29.	Balai Kesehatan Umbulsari	Rp. 33.600,-
30.	Balai Kesehatan Kalisat	Rp. 96.000,-
31.	Balai Kesehatan Sukowono	Rp. 108.000,-
32.	Balai Kesehatan Sumberjambe	Rp. 38.400,-
33.	Balai Kesehatan Sumberrejo	Rp. 14.400,-
34.	Balai Kesehatan Rowotengah	Rp.19.200,-
35.	Balai Kesehatan Lohjejer	Rp. 57.600,-
36.	Balai Kesehatan Klompangan	Rp. 12.000,-
37.	Balai Kesehatan Nogosari	Rp. 19.200,-
38.	Balai Kesehatan Karangduren	Rp. 19.200,-
39.	Balai Kesehatan Semboro	Rp. 24.000,-
40.	Balai Kesehatan Sukorejo	Rp. 38.400,-
41.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Patrang	Rp. 14.400,-

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

42.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Wirolegi	Rp. 28.800,-
43.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Gebang	Rp. 33.600,-
44.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Ambulu	Rp. 28.800,-
45.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Wuluhan	Rp. 48.000,-
46.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Rambipuji	Rp. 33.600,-
47.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Panti	Rp. 14.400,-
48.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Jenggawah	Rp. 28.800,-
49.	Balai Kesehatan Ibu dan Anak Tanggul	Rp. 144.000,-

Tabel 2 Rincian Dana Pembangunan Balai Kesehatan APBD 1970

Sumber: Arsip Dokumen Sekretariat DPRD Kabupaten Jember

Selain pembangunan balai kesehatan pada tabel di atas, memasuki pemerintahan Bupati Abdul Hadi RSUD dr. Soebandi terus meningkatkan mutu pelayanan. Salah satunya meningkatkan kelas rumah sakit menjadi status kelas C dan pada tanggal 12 November 1974 Menteri Kesehatan Prof. Dr. GA Siwabessy meresmikan nama dr. Soebandi sebagai nama resmi rumah sakit umum daerah disaksikan oleh Bupati Abdul Hadi dan Muspida. Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi RSUD dr. Soebandi Jember.

3.10 Pembangunan Kota Administratif

Ide membentuk kota administratif pada Kabupaten Jember berasal dari Abdul Hadi yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jember. Menurutnya Kabupaten Jember yang memiliki wilayah luas hampir sama dengan Malang dan perkembangan Kabupaten Jember yang pesat, Kabupaten Jember akan lebih baik jika dipecah mejadi Kota Administratif, karena dengan begitu fokus perkembangan daerah akan lebih intensif terbantu dengan adanya Kota Administratif yang dipimpin oleh walikota administratif (Mashuri Thohir di Jember pada tanggal 18 Maret 2020).

Adanya gagasan tersebut ternyata disambut baik oleh kalangan Pemerintah Daerah. Maka untuk merealisasikan gagasan pembentukan Kota Administrtif Jember, langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas adanya gagasan pembentukan Kota Administratif agar nantinya masyarakat dapat menerima dan memberi dukungan. Selanjutnya Abdul Hadi segera mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 46 Tahun 1947 untuk membentuk Tim Pembentukan Wilayah Kota

Administratif Jember diketuai oleh Mulyadi Balya yang ditunjuk langsung oleh Bupati Abdul Hadi. Kemudian tim tersebut bertugas mengumpulkan data-data dan membuat kertas kerja dalam rangka pelaksanaan pembentukan wilayah Kota Administratif Jember. Usulan menjadikan Kabupaten Jember dipecah menjadi Kota Administratif ternyata direspon dan disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tentang pembentukan Kota Administratif, maka secara yuridis formal telah terbentuk Kota Administratif Jember (Bambang Hariono, dkk., 2018: 88).

Direstuinya usulan tersebut maka tugas dan wewenang Bupati menjadi berkurang. Wilayah Kota Administratif akan diambil alih oleh Walikota Administratif dan ditetapkan bahwa Kota Administratif Jember meliputi 3 kecamatan dengan 20 desa, penataannya menjadi: Kecamatan Jember dihapus dan dibentuk 3 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates, sedangkan Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi. Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kawedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa yang wilayahnya meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka secara administratif wilayah Kabupaten Jember berubah dan terbagi menjadi 7 wilayah pembantu bupati, 1 wilayah Kota Administratif dan 31 Kecamatan (Jember.info diakses pada tanggal 19 Oktober 2020).

3.11 Dampak Pembangunan Masa Pemerintahan Abdul Hadi dan Pandangan Masyarakat Jember Terhadap Abdul Hadi sebagai Pemimpin Daerah

Pada masa pemerintahan Abdul Hadi terjadi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Jember. Pembangunan yang mayoritas berada di bidang insfrastruktur memiliki dampak baik pada bidang lain sebagai faktor pendorong berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Proyek sebanyak 1559 yang tercatat pada tahun 1971/1972 dilakukan merata pada tiap kawedanan, memiliki dampak terhadap kelancaran kegiatan masyarakat, terutama pada pembangunan jalan. Pada dasarnya jalan merupakan akses penghubung masyarakat, contohnya pada kawasan Talangsari yang sebelumnya merupakan daerah terisolasi walaupun dekat dengan kota. Talangsari menjadi ramai ketika perbaikan jalan dan penataan ulang tempat kegiatan masyarakat

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

dilakukan. Talangsari kemudian menjadi daerah pusat kegiatan masyarakat terutama perekonomian, karena dekat dengan wilayah Pasar Tanjung.

Keberhasilan pembangunan hingga berdampak baik dalam kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari peran pemimpin. Abdul Hadi yang berasal dari ABRI tak lantas membuatnya bersikap otoriter seperti yang tergambar dalam ingatan Orde Baru. Abdul Hadi lebih dikenal sebagai pribadi yang ramah dan selalu menjaga komunikasi dengan masyarakatnya, ia sering melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusannya.

Dari beberapa wawancara yang telah penulis lakukan, nampak bahwa Abdul Hadi dalam kepemimpinannya mengutamakan komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakatnya. Melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat akan memberikan manfaat positif untuk memudahkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disampaikan Mashuri Tohir selaku mantan pegawai pemda dalam wawancara bersama penulis, ia menyatakan bahwa Abdul Hadi selalu mengutamakan komunikasi dan pikiran yang sepaham dengan anggota maupun masyarakatnya. Menurutnya ketika anggota maupun masyarakat telah memiliki *anthuk* yang sama dengan pemimpinnya, maka segala kebutuhan baik pembangunan, peraturan, dll. akan berjalan dengan mudah.

3.12 Desa Wringintelu Kecamatan Puger

Pada era Orde Baru peranan negara atau pemerintah sangat dominan dalam melakukan proses pembangunan. Maka peran pemerintah pusat sangat besar dalam menyukseskan program tersebut, pemerintah pusat akan menginstruksi Pemerintah Provinsi Tingkat I yang kekuasaannya dipegang gubernur, kemudian Pemerintah Tingkat I menginstruksikan programnya kepada para bupati yang berlanjut kepada camat dan kepala desa. Disinilah nampak bahwa peran kepala desa juga sangat penting dalam program pembangunan.

Dampak tersebut terbukti dengan terpilihnya Desa Wringintelu dalam lomba desa terbaik se-provinsi. Lomba tersebut diadakan oleh pemerintah untuk menambah semangat masyarakat dalam membangun desa masing-masing menjadi yang terbaik. Saat itu Kepala Desa Wringintelu bernama Umar Sanusi, di bawah kekuasaanya Desa Wringintelu menjadi desa dengan pertanian, penghasilan, dan pembangunan terbaik tingkat provinsi. Dari kepemimpinannya Desa Wringintelu perlahan berkembang

menjadi desa yang makmur. Langkah awal yang ia kerjakan dalam membangun desa adalah mengumpulkan dana sebagai modal pembangunan, dana tersebut ia dapatkan dari bengkok berupa sawah sebesar 19,5 ha kepala desa dan kerawat yang disewakan. Dari modal tersebut kemudian ia membangun kompleks balai desa beserta poliklinik, pos hansip, tempat ibadah, dan taman kanak-kanak. Di tiap Rt dibangun lumbung persediaan untuk musim paceklik yang dibangun dari sumbangan masyarakat sendiri. Desa ini juga terkenal dengan desa yang teratur dan rapi. Dan dalam pembangunan selanjutnya, Umar Sanusi memberikan kebijakan untuk pengumpulan zakat sebesar 2,5 kw gabah di tiap hektar sawah dengan rata-rata mengahsilakan 200 ton gabah sebagai dana pembangunan. Setiap jengkal tanah pekarangan wajib ditanami sayur mayur sebagai bahan pangan sendiri dan dijual, kemudian di tiap selokan warga diwajibkan untuk menyebar bibit ikan lele (*Tempo*, 17 September 1977).

Pada tanggal 15 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Pemerintahan Dalam Negeri se-wilayah Besuki di Desa Wringintelu Jember. Konferensi tersebut dibuka oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang saat itu dijabat oleh Moch.Noer, beliau sekaligus memberikan pembekalan, arahan, dan petunjuk kepada kepala daerah dan kepala desa. Keputusan menyelenggarakan konferensi tersebut sekaligus untuk menunjukkan kepada peserta konferensi contoh desa teladan.

Banyak pencapaian yang didapatkan Kabupaten Jember setelah Wringintelu mendapatkan penghargaan sebagai Desa Teladan pada saat itu. Kabupaten Jember lebih dikenali di kalangan Pemerintah Pusat. Buktinya, selain menjadi tempat diadakannya Konferensi Pemerintah Dalam Negeri, Desa Wringintelu juga ditunjuk sebagai tempat diadakannya lomba kelompok tani, hal ini membuat Jember semakin dikenal daerah lain termasuk dalam kalangan pemerintahan daerah lain.

4. Kesimpulan

Terjadinya perubahan baik dalam segi peningkatan ataupun penurunan perkembangan daerah tergantung pada pemimpin yang menggerakkan. Kepemimpinan menentukan adanya kebijakan-kebijakan dengan program yang memiliki orientasi kebutuhan masyarakat. Perjalanan kepemimpinan Abdul Hadi sebagai bupati dapat disimpulkan bahwa dengan kepemimpinannya yang bersifat paternalistis mampu membawa perubahan terhadap daerah hingga menghasilkan pembangunan-pembangunan berupa fisik dan non-fisik.

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

Abdul Hadi menjadi bupati di Kabupaten Jember masa Orde Baru pada tahun 1968-1979, dimana saat itu pemerintahan didominasi oleh Golkar dan ABRI. Ia diangkat menjadi bupati diusulkan melalui DPRD Kabupaten Jember dengan suara aklamasi. Dalam program pembangunannya, ia banyak melakukan perbaikan bidang infrastruktur sebagaimana yang tertera pada program pemerintah yaitu REPELITA. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi daerah tersebut seperti infrastruktur meliputi jalan, sarana dan prasarana, pendidikan, serta sumber daya alam yang kurang memadai. Beberapa daerah di dekat kota juga masih menjadi wilayah terisolir, mengindikasikan adanya pembangunan yang belum merata. Terpilihnya Abdul Hadi sebagai Bupati Kabupaten Jember berupaya member perbaikan kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang infrastruktur yang memiliki peran sangat penting dalam kelancaran komunikasi masyarakat.

Dua tahun masa pemerintahannya, Abdul Hadi memiliki beberapa pencapaian antara lain: perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan kantor pemerintah daerah, pembangunan puskesmas, pembangunan pasar kota dan daerah, pembangunan masjid, pembangunan kota administratif, dll. Pada awal kepemimpinannya, ia melakukan penertiban terhadap pegawai pemerintah daerah. Kemudian yang sangat dibutuhkan saat itu ialah pembukaan daerah terisolir dan pembangunan jalan, atas keberhasilan dalam pembangunan ini, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dalam perkembangan ekonomi maupun lainnya. Pembangunan ini membuka wilayah-wilayah dekat kota yang terisolir, seperti Tegalboto, Talangsari, Tegalbesar, dll. pembangunan ini dibiayai oleh daerah dan gotong royong masyarakat. Kepemimpinan dengan gaya paternalistis, ia mampu melibatkan dan menyatukan masyarakat dalam setiap pembangunan, membuat kemudahan dalam jalannya pembangunan, walaupun saat itu memiliki keterbatasan dalam biaya, tak membuat rancangan pembangunan mundur, seperti yang terjadi dalam kebijakan Abdul Hadi dalam pembangunan Masjid Al Baitul Amin Jember. Upaya dalam pengumpulan biaya dilakukan dengan gotong royong, Abdul Hadi membentuk tim pembangunan masjid dengan melibatkan pegawai dan tokoh setempat. Kemudian ia memberikan kebijakan pengumpulan dana melalui pengumpulan padi dalam tiap panen masyarakat. Dari hasil kebijakan tersebut kemudian dilakukanlah pembangunan masjid hingga tampak seperti saat ini.

Kemudian dalam sektor perekonomian juga dibangun wadah pertukaran ekonomi masyarakat, yaitu pasar. Pasar Tanjung menjadi salah satu ikon Kabupaten Jember yang juga dibangun di masa Pemerintahan Abdul Hadi. Dimulai pada tahun 1971 Pasar Tanjung direncanakan dengan menggunakan dana APBD dan terselesaikan pada tahun 1976. Dalam bidang pertanian menyediakan penyuluhan dengan program BIMAS. Dampak dari pembangunan tersebut adalah peningkatan pada beberapa sektor terutama perekonomian. Pada tahun 1976 sektor pertanian menjadi bidang dengan peningkatan tertinggi di wilayah Kota Administratif Jember, sebanyak 15,8%. Dari peningkatan tersebut Abdul Hadi membawa kepercayaan masyarakat, ia juga gemar berkunjung ke desa dan menyapa masyarakat. Di hari libur ia seringkali mengelilingi wilayah Kabupaten Jember untuk melihat potensi, dan melihat perkembangan sektor yang telah dibangun, dalam kesempatan itu ia menyempatkan untuk berkunjung di rumah warga dimaksudkan agar lebih akrab kepada masyarakatnya. Kebiasaan tersebut membuat Abdul Hadi dikenal ramah di kalangan masyarakat Jember.

Keberhasilan Abdul Hadi sebagai bupati tidak lepas dari pengalaman yang dimiliki sebelum menjadi bupati yang membentuk kepemimpinannya. Abdul Hadi mengawali karirnya dari bergabungnya ia di kesatuan TNI. Ia juga merupakan salah satu prajurit perang yang ikut tergabung dalam merebut kemerdekaan. Beberapa pengalaman menjadi pemimpin juga ia peroleh dalam perjalanan karir militernya. Seperti pada tahun 1967 ia menjadi Komandan Batalyon 512 sebelum akhirnya ia dipindahkan di Kodim 0824 Jember sebagai Komandan Kodim. Kemudian sifat ramah dan merakyat ia juga dapatkan dari pengalamannya yang banyak berinteraksi dengan masyarakat selama bertugas. Sebagai seorang prajurit, ia terbiasa berjuang bersama masyarakat menggapai kemerdekaan. Hal tersebut menjadikan Abdul Hadi cenderung mudah memahami keinginan masyarakat dan pandai dalam merebut perhatiannya. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki kemudian ia banyak terapkan dalam kepemimpinannya.

Daftar Sumber

1. Arsip

Daftar Rencana Pembangunan Agraris tahun 1971 dalam daerah Kabupaten Jember.

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

Lampiran Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Jember, No. Des.33/X/DPRGR tentang Pelebaran Jalan dan Bentuk Depan Toko-toko Dalam Daerah Kabupaten Jember.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 4 Tahun 1970 tentang Menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Jember.

PU Cipta Karya. *Profil Kabupaten Jember.*

Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember No.Sek./79/1968 tentang Pembentukan Tim Operasi Binamarga Daerah Kabupaten Jember.

Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pemda 10/24/10-294 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 4 tahun 1970 Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Jember dikeluarkan pada tanggal 3 November 1970.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Gotong Royong Kabupaten Jember No.Des.18/III/DPRD-GR tentang Pembangunan Sport Hall (Gedung Olahraga) dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 1971.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong No.Des.10/IX/DPRGR tentang Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dikeluarkan pada tanggal 16 September 1969.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong No.Des.08/IX/DPRD-GR tentang *upgrading* Pasar Tanjung dikeluarkan pada tanggal 20 September 1971.

Undang-undang No.4 Tahun 1950 Pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan dan Pengajaran.

2. Buku dan Jurnal

Gonggong, Anhar. *Mrg.Albertus Soegijapranata, SJ., Antara Gereja dan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1993.

Gotchalk, Louis. *Mengerti Sejarah (trj) Nugraha Noto Susanto*. Jakarta: UI Press. 1980.

Hariono, Bambang, dkk. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perkembangan Kabupaten Jember Buku II1971-1999*. Jember: Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. 2010.

_____. *Jember dari Waktu ke Waktu: Sekilas Wakil Rakyat dan Perkembangan Kabupaten Jember Prasejarah ans.d 1970-an* (*cetakan I)*.Jember: Sekretariat DPRD Kabupaten Jember. 2018.

Ichsan BA, Moch., dan Zainal Anshari.*Sejarah Masjid Jami' Al Baitul Amien Jember: Mengurai Peran dan Konstribusinya* Cetakan I. Jember: Superior. 2017.

Kansil, CST. *Inti Pengetahuan Repelita*. Jakarta: Erlangga. 1970.

Sunindhia, Y. W., dan Ninik Widiyanti. *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. 1993.

3. Koran

Jember.info. "Selayang Pandang". [*Online*] https://www.jember.info/selayang-pandang diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 14.29 WIB.

Kompasiana. "Pasar Tanjung, Ikon Pasar di Jember dan Segala Keunikannya".https://www.kompasiana.com/rusydi.arif/pasar-tanjung-ikon-pasar-di-jember-dan-segala-keunikannya_54f92279a33311d33b8b4d73 diakses pada tanggal 15 November 2020 pada pukul 10.56 WIB.

Liputan6. "Mengungkap Sejarah Masjid Jami' Al Baitul Amien di Jember".https://m.liputan6.com/regional/read/3534360/mengungkap-sejarah-masjid-jami-al-baitul-amien-jember?utm_source=Mobile&utm_medium=copy-link&utm_campaign=Share_Hanging diakses pada tanggal 21-10-2020 pukul 20:38 WIB.

"Jember Aktif Membangun Dalam Segala Bidang (IV)". Harian *Suara Rakyat* Edisi Tanggal 4 September 1972.

"Umar Sanusi Ada Di Sini". Harian *Tempo* Edisi Tanggal 17 September 1977.

4. Internet

Kober. "Masjid Agung Jember Bernama Baitul Amien". [*Online*] http://komunitasorangjember.blogspot.cpm/2012/02/masjid-agung-jember-bernama-baitul.html?m=1 diakses pada tanggal 21-10-2020 pukul 20:45 WIB.

5. Skripsi

Nisa', Noviah Iffatun. "Strategi Pemenangan Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Tahun 1971-1997". *Skripsi.* Jember: Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. 2016.

Nurjannah, Luthfia. "Pendekatan Extending Tradition Pada Bangunan Pasar Tanjung Jember. Studi Kasus: Perancangan Kembali Pasar Tanjung di Kabupaten

ISSN : 1829 - 975X
e-ISSN : 2774 - 9932

Jember".*Skripsi*.Malang: Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

6. Wawancara

Wawancara dengan Mashuri Tohir di Jember pada tanggal 08 Maret 2020.

Wawancara dengan Nuryani di Jember pada tanggal 25 Oktober 2019.